

**ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SESUAI  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000  
PADA PT. CAHAYA ARAMINTA  
PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mengikuti Ujian  
Oral Comprehensive Sarjana Lengkap Pada  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Riau*

**SKRIPSI**



**OLEH  
MURNIATI  
10473026231**

**Program: S1  
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2009**



## **ABSTRAK**

### **ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 PADA PT. CAHAYA ARAMINTA PEKANBARU**

**OLEH :  
MURNIATI  
10473026231**

*Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Arminta yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Kampung Dalam Kotamadya Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh PT. Cahaya Araminta, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan.*

*Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder, struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan serta data-data yang mengenai pembukuan seperti neraca, laporan laba/rugi, Faktur Pajak Standar, Surat Setoran Pajak, dan SPT Masa PPN Tahun 2007 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember*

*Hasil Penelitian menemukan adanya pengkreditan Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikreditkan, Faktur Pajak cacat, kesalahan dalam pengisian nomor seri Faktur Pajak. Disamping itu penulis juga menemukan bahwa akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya telah sesuai dengan mekanisme akuntansi.*

**Kata Kuncinya :** *Faktur Pajak Standar, Pajak Masukan, Pajak Pertambahan Nilai*

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika penulisan .....	9
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pajak.....	11
B. Fungsi Pajak.....	14
C. Syarat Pemungutan Pajak .....	16
D. Pajak Pertambahan Nilai.....	17
E. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai .....	18
F. Dasar Hukum .....	20
G. BKP dan JKP PPN.....	20
H. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
I. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	23
J. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai .....	24
K. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	42
L. Saat dan Tempat Terutang .....	43
M. Faktur Pajak.....	44
N. Pengkreditan Pajak Masukan.....	55

O. Surat Pemberitahuan (SPT).....	57
P. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	60
Q. Pajak Dalam Islam.....	65
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	68
B. Struktur Organisasi .....	69
C. Aktivitas Perusahaan.....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Subjek Pajak.....	74
B. Pengkreditan Pajak Masukan.....	74
C. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	76
D. Koreksi Atas Faktur Pajak Standar Cacat atau Tidak Lengkap.....	78
E. Pembetulan SPT Masa PPN.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi Negara pajak merupakan instrument pemerintah yang primer dan strategis. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong perekonomian yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Mengenai seluruh penerimaan pajak dan tata cara pemungutan pajak, telah diatur dalam sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang telah dibuat pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah diberlakukannya undang-undang pajak yang baru, menggantikan sejumlah undang-undang dan peraturan sejenisnya yang berlaku sebelumnya, undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 tahun 1983 yang selanjutnya biasa disebut UU KUP 2007.
2. Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-undang No.10 tahun 1994, yang selanjutnya biasa disebut UU PPh 2000.
3. Undang-undang No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 dan perubahan sebelumnya Adalah

- Undang-undang No.11 tahun 1994. Selanjutnya biasa disebut UU PPN dan PPnBM 2000.
4. Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menggantikan Undang-undang No.12 tahun 1985, selanjutnya Undang-undang ini disebut UU PBB 1984
  5. Undang-undang No.13 tahun 1983 tentang Bea Materai yang pada bulan Desember 1994, bea materai diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Keputusan Menteri Keuangan No.182/KMK-04/1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1995. Undang-undang ini selanjutnya biasa disebut UU Bea Materai 1985.

Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan pajak yang dititik beratkan pada objek pajak itu sendiri yang wajib dipungut oleh wajib pajak pada waktu terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Didalam Daerah Pabean Republik Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang memerlukan peran serta dari dunia usaha dalam pelaksanaannya. Perusahaan merupakan pihak yang terlibat dalam memegang peran penting dalam pelaksanaan Undang-undang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur produksi berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lebih berat.

Pertambahan nilai itu sendiri karena dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

Secara umum tarif PPN yang berlaku adalah 10% yang pengenaannya diterapkan pada tingkat penyerahan barang oleh pabrikan atau importir atau pengusaha kena pajak lainnya, sehingga tarif yang menjadi beban konsumen tidak akan melampaui batas 10% dari harga eceran. Untuk Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%.

Atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terutang pajak. Faktur pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha dapat dipungut, diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang.

Seorang Pengusaha Kena Pajak akan dipungut PPN dari Barang atau Jasa yang dibeli atau diperoleh untuk keperluan usahanya. Barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh tersebut merupakan masukan atau keperluan usahanya dan pajak yang telah dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa tersebut merupakan pajak masukan.



Setiap bulan Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang Pengusaha Kena Pajak tersebut harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan jumlah pajak harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran Maka selisihnya merupakan hak Pengusaha Kena Pajak untuk meminta kembali atau dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya.

Pada hakekatnya, Pengkreditan Pajak Masukan sama dengan upaya untuk memperoleh kembali PPN yang telah dibayar. Sehingga apabila pajak masukan itu telah dikreditkan berarti PPN yang telah dibayarkan atas perolehan Barang Kena Pajak bisa dikreditkan. Hal itu harus dilihat lebih dahulu apakah biaya perolehan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak.

PT. Cahaya Araminta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa Kontruksi. Kewajiban perusahaan dalam membayar pajak berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25. Atas kegiatan perdagangan yang menghasilkan nilai tambah yang menurut UU Perpajakan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan laporan SPT Masa PPN bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah sebesar Rp.25.371.888.308,-. PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.22.525.018.055,- dan

penyerahan yang PPN tidak dipungut sebesar Rp.2.846.870.253,-.

Dari laporan SPT Masa ternyata PT. Cahaya Araminta mengisi SPT Masa tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Yaitu yang berkaitan dengan:

1. PT. Cahaya Araminta mengkreditkan pajak masukan atas pembelian rangka atap baja ringan pada PT. Bluescope Lysaght Indonesia untuk proyek perumahan Aceh yang diserahkan ke BUT Chatolic Relief Services. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001, tidak dipungut PPN. Hal ini dikarenakan oleh BUT Chatolic Relief Service adalah sebuah perusahaan dimana sumber dananya berasal dari hibah atau dana pinjaman Luar Negeri.
2. Dalam transaksi jual beli, PT. Onduline Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur Pajak Standar yang ditujukan kepada PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak terdapat kesalahan yaitu tidak adanya cap dan tandatangan. Sebagaimana penegasan dalam Pasal 13 ayat (5) bahwa Faktur Pajak harus diisi lengkap, benar dan jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f. Adanya kekurangan satu huruf atau kesalahan ejaan dalam suatu kata dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat, dan dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) Undang-undang KUP.

3. Pada SPT Masa PPN Bulan Agustus PT. Cahaya Araminta salah dalam memasukan Kode Faktur Pajak Standar, pada pajak masukan atas nama PT. Granitoguna Buillding Ceramics dengan Kode Faktur Pajak Standar 010-001.07.00002855 (ini menunjukkan kode cabang) sedangkan di Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh PT. Granitoguna Buillding Ceramics Nomor Faktur Pajak Standarnya adalah 010-000.07.00002855 (ini menunjukkan kode pusat). Sehingga PT. Cahaya Araminta harus membetulkan SPT Masa PPN Bulan Agustus karena tidak sesuai dengan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT. Granitoguna Buillding Ceramics yang dapat menyebabkan terjadi pemeriksaan oleh Kantor Pajak. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung dari sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh perusahaan khususnya PPN pada PT. Cahaya Araminta pekanbaru dengan judul **“Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka perumusannya adalah:

1. Apakah PT. Cahaya Araminta telah menerapkan mekanisme perhitungan PPN sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000.

### **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Untuk mengetahui Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan melihat praktek di perusahaan dalam tata cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Sebagai bahan informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 20 Kampung Dalam Kotamadya Pekanbaru 28152, yaitu pada bagian perpajakan, proyek dan akuntansi.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan serta data pembukuan seperti laporan aktiva tetap, laporan perhitungan laba rugi, neraca dan SPT Masa.

### **b. Sumber Data**

Sumber Data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan laporan yang diperoleh kepala bagian perpajakan dan akuntansi untuk data sekunder dan bahan-bahan tulisan yang berdasarkan dari perundang-undangan.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Wawancara langsung dengan kepala bagian perpajakan dan bagian akuntansi.

## **4. Analisa Data**

Untuk menelaah masalah yang ada dalam perusahaan yang diteliti, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya mengoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan permasalahan dan sebagai penutup diambil kesimpulan dan saran-saran kepada perusahaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan akan dilakukan sesuai dengan kerangka skripsi dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini uraian teoritis ini penulis akan menguraikan teori –teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.
- BAB III** : Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu PT. Cahaya Araminta. Disini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi serta bidang kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
- BAB IV** : Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai PT. Cahaya Araminta sehubungan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta penerapannya pada perusahaan tersebut.
- BAB V** : Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan atas analisa permasalahan, serta memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Pajak**

Peranan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam anggaran perbelanjaan Negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peranan serta masyarakat sebagai pelaksana perpajakan. Pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara nasional. Secara rinci terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang ternyata mempunyai maksud yang sama, antara lain:

1. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2000:1)

“Pajak adalah iuran rakyat pada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Andriani dalam Untung Sukardji (2000:1)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran Rakyat Kepada Negara Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaan.
3. Tanpa jasa Timbal Balik atau Kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dilihat dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Taatbestand) untuk membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di bidang keuangan.

Dari segi ekonomi, pajak mengurangi pendapatan individu, mengurangi daya beli seseorang, mengubah pola hidup. Sebaliknya bagi Negara merupakan penghasilan tanpa menimbulkan kewajiban pada Negara terhadap wajib pajak. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain memberikan dampak yang besar pada



perokonomian Negara. Adapun unsur-unsur pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

a. Ada masyarakat

Unsur masyarakat harus ada, karena pajak dipungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum ada jika ada masyarakat yang berkelompok.

b. Berdasarkan Undang-undang

Pemungut pajak harus berdasarkan pada Undang-undang, sehingga diakui keabsahannya.

c. Ada pemungut pajak

Pemungut pajak adalah pemerintah.

d. Ada wajib pajaknya

Dapat berupa wajib pajak perseorangan atau wajib pajak badan.

e. Ada obyek pajak

Keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi obyek pajak:

1. Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dikenai pajak penghasilan.
2. Peristiwa, suatu keadaan di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran, atas peristiwa ini menerima santunan dari pihak perusahaan.
3. Asuransi, peristiwa ini merupakan obyek pajak penghasilan.

Sedangkan ciri-ciri pada pengertian pajak adalah:

- a. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah.

- b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara, yaitu pengadilan dan surat paksa
- c. Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang.

## **2. Fungsi Pajak**

Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut. Dari pengertian pajak yang telah disampaikan pada sub bab diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam berkehidupan negara dan masyarakat, yaitu:

### **1. Fungsi Budgetair**

Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara bagi APBN untuk membiayai tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos penerimaan Negara atau penerimaan dalam negeri. Sumber yang diperoleh dari: penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak.

### **2. Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, maupun politik. Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan

nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Misalnya untuk membangun atau mengembangkan suatu kawasan tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif di bidang perpajakan, sehingga investor mau mengucurkan investasinya disana, atau untuk mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan dan keringanan pajak, sehingga mendorong dunia usaha melakukan ekspor. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bisa dinaikkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP, tidak dikenakan pajak. Inilah beberapa contoh fungsi regulasi pajak, yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

### **3. Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2000:2) berpendapat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Kepada Undang-undang (Syarat Yuridis).

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyediakan keadilan, baik bagi negaranya maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **4. Pajak Pertambahan Nilai**

Sukardji (2000:19), menyatakan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PPN ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana dalam transaksi pembelian tersebut agen tersebut juga dipungut PPN

sebesar 10% dari harga jual produk dan ketika agen tersebut menjual produk tersebut ke konsumen akhir maka agen tersebut juga memungut PPN 10% dari harga jual produk, dari ilustrasi ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran pajak atau *tax shifting* dimana PPN sebesar 10% yang dibebankan oleh produsen kepada agen telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir.

Selain pajak tidak langsung juga terdapat pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, dan berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

## **5. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai**

Mekanisme PPN Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

### **1. Kelompok Umum**

Mekanisme PPN Kelompok Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 UU PPN 1984 seperti berikut:

- a. Setiap Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada siapa pun wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak terutang disebut pajak keluaran.
- b. Pada saat Pengusaha Kena Pajak membeli Barang Kena Pajak atau memperoleh Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain juga menerima faktur pajak masukan.
- c. Pada akhir masa pajak, pajak masukan diperhitungkan dengan pajak keluaran. Apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka PPN lebih besar dapat dikompensasikan atau direstitusikan (diminta kembali).
- d. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka PPN kurang bayar disetor ke bank persepsi atau kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- e. Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan sanksi Rp 50.000,00 bila lalai.

## **2. Kelompok Khusus**

Mekanisme PPN kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A UU PPN 1984, yaitu:

- a. Instansi pemerintah, badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

- b. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN, wajib membuat bukti pemungutan, yaitu faktur pajak.
- c. Di saat pemungut PPN melakukan pembayaran harga jual atas Barang Kena Pajak dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak “memungut” pajak terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama Pengusaha Kena Pajak rekanan pemasok dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Surat Setoran Pajak tersebut lalu diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang berkepentingan.

## **6. Dasar Hukum**

Berlaku Undang-undang No.18 tahun 2000 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No.8 tahun 1983 yang berubah menjadi Undang-undang No.11 tahun 1994 mengenai PPN Barang dan Jasa serta PPnBM, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985

Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Pemerintah No.143 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa serta PPnBM sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-undang No.11 tahun 1994 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang No.18 tahun 2000 serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

## **7. Barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)**

### **a. Barang Kena Pajak**

Menurut Sukardji (2000:55) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

#### **Pengecualian Barang Kena Pajak.**

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a) Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti: Minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak serta biji bauksit.
- b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
- d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

### **b. Jasa Kena Pajak**



Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

### **Pengecualian Jasa Kena Pajak**

Berdasarkan Pasal 4A Ayat (3), jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dalam Ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan medik
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- e. Jasa di bidang keagamaan
- f. Jasa di bidang pendidikan
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
- j. Jasa di bidang tenaga kerja
- k. Jasa di bidang perhotelan
- l. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

### **8. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Rimsky K (2005:335) Subjek Pajak disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak. Secara umum, setiap PKP diwajibkan

untuk memungut PPN, menyetor dan melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Untuk menjadi PKP setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran untuk memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan penjualan kurang dari 600 juta setahun.

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, antara lain:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti jual beli, tukar menukar, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan atas BKP.
2. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma BKP.
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
6. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang, dari kantor cabang ke kantor pusat, dan penyerahan antar kantor cabang.
7. Penyerahan barang secara konsinyasi

## **9. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Rimsky K juga mengatakan, bahwa Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan PKP.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

5. Pemakaian Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh PKP.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Penyerahan barang /jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

## **10. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam UU PPN dikenal dengan dua jenis fasilitas PPN, yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPN tidak dipungut. Hal terpenting yang harus dipahami berkenaan dengan fasilitas PPN tersebut adalah bahwa transaksi yang sebenarnya merupakan objek PPN atau telah memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan PPN, karena sebab tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN-nya tidak dipungut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, konsep ini harus dibebaskan dengan konsep tidak dikenakannya PPN, yaitu suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan PPN, misalnya barang yang diserahkan bukan BKP.

Berdasarkan penjelasan Pasal 16B UU PPN, tujuan dan maksud diberikannya fasilitas ini adalah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berpiritas tinggi dalam skala nasional, mendorong pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Fasilitas yang diberikan terbatas untuk :

1. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut.
2. Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara atau Negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi.
3. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional.
4. Menjamin tersedianya Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun Internal.

#### **A. PPN Tidak Dipungut atas Impor Barang Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004, disebut bahwa barang kiriman atau hadiah untuk keperluan umum, amal, sosial, atau kebudayaan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Barang-barang kiriman atau hadiah untuk keperluan umum, amal, sosial, atau kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/997, tentang pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman atau hadiah untuk keperluan

Ibadah umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2006. Barang-barang tersebut, yaitu:

- a. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan Ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan sekolah atau barang yang akan merupakan inventaris tetapnya
- b. Makanan, obat-obatan, dan pakaian untuk diberikan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan, termasuk bantuan bencana alam
- c. Barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran diberikan Cuma-Cuma untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat
- d. Barang-barang yang diperlukan dalam rangka penanganan korban bencana alam.

## **B. PPN Tidak Dipungut atas Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri**

Ketentuan yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995, tanggal 30 Oktober 1995, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 1998, PP No. 43 Tahun 2000 tanggal 23 Juni 2000, dan terakhir dengan pp No. 25 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001.

Mekanisme fasilitas PPN tidak dipungut terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut proyek pemerintah yang di biayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, pada prinsipnya diberikan untuk:

- a. Pemasukan barang dan jasa dari luar daerah pabean oleh kontraktor utama, yang meliputi:
  - a) Impor Barang Kena Pajak ( BKP),
  - b) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean
  - c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh kontraktor utama kepada pemilik proyek.

Pengertian kontraktor utama dapat dilihat dalam pasal 1 Huruf f Keputusan Menteri Keuangan No. 238/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996, yaitu kontraktor, konsultan dan pemasok (*supplier*) yang berdasarkan kontrak melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh kontraktor utama dari subkontraktor atau pihak lain, tetap terutang PPN yang bagi kontraktor utama merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut.
3. Dalam hal proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah /dana pinjaman luar negeri dikerjakan oleh kontraktor utama yang merupakan Joint Operation (JO)
4. Dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek atas dasar “turn key” namun barang-barang yang tercantum dalam daftar barang yang akan diimpor (*master list*) itu diimpor oleh dan atas nama pemilik proyek maka Dasar Pengenaan Pajak yang

tercantum dalam daftar Faktur Pajak dibuat atas dasar kontrak dikurangi dengan nilai impor atas barang-barang yang Pemberitahuan Impor tidak dipakai (PIUD-nya) atas nama pemilik proyek tersebut.

5. Dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek pemerintahan yang sebagian dananya dibiayai dari hibah/dana pinjaman luar negeri dan sebagian lainnya dari APBN/APBD/dana lain selain hibah/dana pinjaman luar negeri maka ketentuannya adalah sebagai berikut:
  - a. Atas penyerahan /penerimaan termin proyek yang dibiayai dari hibah/dana pinjaman luar negeri: Tidak dipungut PPN dan PPnBM, Faktur Pajak tetap dibuat dengan diberi cap "PPN dan PPnBM tidak dipungut" Surat setoran Pajak tidak perlu dibuat.
  - b. Atas penyerahan /penerimaan termin proyek yang dibiayai dengan dana APBN/APBD/dana selain hibah/dana pinjaman luar negeri: Terutang PPN, Faktur Pajak harus dibuat, SSP harus dibuat.
6. PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam Daftar Isian Proyek atau dokumen yang dipeprsamakan dengan Daftar Isian Proyek, maupun yang teruspinjaman (*subsidiar loan agreement*) yang sudah terlanjur dipungut atau disetor sejak tanggal 1 April 1995, dapat diminta pengembaliannya oleh pemilik proyek dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat kontraktor utama sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan dilampiri: Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), dan Surat

pernyataan bahwa PPN tersebut belum dikreditkan sebagai Pajak Masukan atau dibebankan sebagai biaya.

**C. PPN Tidak Dipungut atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri.**

Pokok-pokok ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK..03/2007 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.02/2007, yaitu:

1. Proyek Pemerintah adalah proyek rehabilitasi dan rekontruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pascabencana alam gempa bumi dan Tsunami yang dibiayai hibah luar negeri.
2. Hibah luar negeri adalah bantuan dari pihak luar negeri kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) atau diwakili instansi/departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang kegiatannya berada dibawah koordinasi BRR.
3. Kontrak adalah perjanjian atau perikatan untuk melaksanakan proyek pemerintah yang paling sedikit harus memuat : nilai hibah, bentuk hibah, Jenis hibah, Jangka waktu, pihak yang ditunjuk oleh pemberi hibah untuk melaksanakan proyek pemerintah.
4. Kontraktor utama adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier), termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih, yang ditunjuk oleh pihak pemberi hibah luar negeri



untuk melaksanakan proyek hibah atau pihak yang mengikat kontrak dengan pemberi hibah luar negeri sebagai pelaksana proyek pemerintah.

5. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN oleh kontraktor utama dan/atau subkontraktor, kontraktor utama dan/atau subkontraktor wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap Tidak dipungut PPN dan PPnBM sesuai PP No.42 Tahun 1995, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.25 Tahun 2001.

#### **Atas Impor dan/Penyerahannya dibebaskan PPN**

- a. Barang modal berupa ini terdapat mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas suku Madang.
  - b. Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan.
  - c. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, kehutanan, peternakan, penangkaran, dan perikanan.
  - d. Barang hasil pertanian.
1. Atas penyerahannya dibebaskan PPN
    - a. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain, baik oleh PAM milik Negara maupun Swasta.
    - b. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt.
    - c. Rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI).
  2. Barang Kena Pajak Tertentu
    - a. Senjata, amunisi, alat angkutan di Air, alat angkutan dibawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, Kendaraan lapis baja, kendaraan

patroli, dan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh departemen pertanian, tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, belum dibuat di dalam Negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.

- b. Vaksin polio rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.
- d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.
- e. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang digunakan untuk usaha perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan.
- f. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia,

dan komponen atau bahan yang dimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Karet Api Indonesia, yang digunakan untuk perbaikan kareta api, suku cadang,

- g. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang penyediaan data batas foto udara wilayah NKRI yang digunakan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh pihak departemen pertahanan atau TNI.
- h. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan relajar serta perumahan lainnya yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

**b). Jenis Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari pengenaan PPN**

1. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-233/PJ./2003 Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu,
2. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ.51/2003 Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penyampaian Ketentuan tentang Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena pajak Tertentu.

Kelompok JKP Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan PPN

Jasa Kena Pajak Tertentu

1. Jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, yang meliputi ;
  - a. Jasa Pesawat terbang.
  - b. Jasa Pelabuhan, dan
  - c. Jasa Perawatan
2. Jasa Perawatan atau reparasi Karet Api yang diterima oleh PT (Persero) Karet Api Indonesia
3. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang semata-mata keperluan ibadah.
4. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
5. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data foto udara wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional.

**C). Fasilitas Dibebaskan PPN atas Peyerahan Barang Kena Pajak/Jasa dalam rangka Penanganan Bencana Alam.**

Fasilitas dibebaskan PPN ini diberikan tetap dalam koridor Peraturan Pemerintah No. 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2003. Dalam PP tersebut, fasilitas dibebaskan PPN diberikan atas:

1. Peyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan belajar, serta perumahan lainnya yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dan
2. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana, serta perumahan lainnya yang semata-mata untuk keperluan ibadah.

Pokok-pokok ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.03/2006 yang berkaitan dengan fasilitas dibebaskan PPN adalah sebagai berikut:

1. Bencana alam yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu:
  - a. Gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 27 Mei 2006.
  - b. Gempa bumi dan Tsunami yang terjadi di Pesisir Pantai selatan Pulau Jawa pada Tanggal 17 Juli 2006.
2. Barang Kena Pajak tertentu adalah bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.
3. Jasa Kena Pajak Tertentu adalah jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan yang semata-mata untuk tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, klinik, puskesmas serta bangunan MCK yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.
4. Atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak Tertentu di atas bebas dari pengenaan PPN.

5. Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang/Jasa Kena Pajak tertentu sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak Tertentu (poin 2) dan/atau (poin 3) sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dikreditkan.
6. Atas kegiatan pembangunan sendiri tempat tinggal dan tempat usaha yang terkena bencana alam dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih dan bersifat permanen diberikan fasilitas keringanan PPN, dengan ketentuan :
  - a. PPN dihitung dengan tarif 10% X Dasar Pengenaan Pajak.
  - b. Dasar Pengenaan Pajak adalah 10% dari jumlah biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah sehingga tidak ada PPN dibayar (nihil).
  - c. Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, PPN yang dibayar atas impor dan/atau perolehan BKP/JKP sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.
7. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan (tanggal 13 oktober 2006) berakhir (tanggal 31 desember 2008).
8. Wilayah bencana alam yang diberikan keringanan pembayaran PPN atas kegiatan pembangunan sendiri terbatas hanya untuk wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### **A. Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut**

##### **a. PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu yang Dibebaskan dari Bea Masuk**

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 143 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember, sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2002 atas impor BKP

yang berdasarkan perundang-undangan pabean dibebaskan dari pungutan bea masuk, pajak yang terutang tetap dipungut PPN kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan No.231/KMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.616/PMK.03/2004 Tanggal 30 Desember 2004, antara lain:

1. Atas Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Menyimpang dari ketentuan di atas, ada sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**b. PPN Tidak Dipungut atas Impor Barang Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam.**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No 231/KMK.03/2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.616/PMK.03/2004, disebutkan bahwa barang kiriman hadiah untuk keperluan Ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan tidak dipungut PPN.

Barang yang termasuk kiriman hadiah untuk keperluan Ibadah umum, sosial, amal, atau kebudayaan di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.04/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Diriman Hadiah untuk keperluan Ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.04/2006 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/KMK.04/2006. Barang-barang tersebut yaitu:

1. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan Ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan sekolah.
2. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas Ibadah umum, dan petugas kesehatan.
3. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan yang bertujuan kebudayaan.
4. Barang yang diperlukan untuk Ibadah umum.
5. Peralatan operasi, perkakas pengobatan, dan bahan pembalut yang digunakan untuk badan-badan sosial.
6. Makanan, obat-obatan, dan pakaian yang diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan, termasuk bantuan bencana alam.
7. Barang peralatan belajar mengajar.
8. Barang-barang yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam.

**c. PPN Tidak dipungut atas Impor Barang yang Mendapat Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)**

Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) ini menggantikan fasilitas Bapeksta Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan No.129/KMK.04/2003 Tanggal 9 April 2003 yang menjadi dasar hukum fasilitas Bapeksta Keuangan telah dicabut/dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003.



**d. PPN tidak Dipungut atas Proyek Pemerintah yang Dibiayai oleh Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.**

Ketentuan yang mengatur tentang hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1995 Tanggal 30 Oktober 1995, sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Juni 1998 Tanggal 23 juni 1998, PP No.43 Tahun 2000 Tanggal 23 Juni 2000, dan terakhir dengan PP No.25 Tahun 2001 Tanggal 18 Mei 2001.

Mekanisme fasilitas PPN tidak dipungut terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ.53/1996 Tanggal 4 Juni 1996 (Seri PPN 34-95), yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, pada prinsipnya diberikan untuk :
  - a. Pemasukkan barang/jasa dari luar daerah pabean oleh kontraktor utama, yang meliputi :
    - Impor Barang kena Pajak (BKP)
    - Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP)
  - b. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak oleh kontraktor utama kepada pemilik proyek.

Pengertian kontraktor utama dapat dilihat dalam Pasal 1 Huruf f Keputusan Menteri Keuangan No.239/KMK.01/1996 Tanggal 1 april 1996, yaitu kontraktor, konsultan dan pemasok (suplier) yang berdasarkan kontrak pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah/dana luar negeri.

2. Perolehan Barang/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh kontraktor utama dari subkontraktor atau pihak lain, tetap terutang PPN yang dibagi kontraktor utama merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang BKP/JKP tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut.
3. Dalam hal proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri dikerjakan oleh kontraktor utama yang merupakan *Join Operation* (JO) maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Atas penyerahan BKP/JKP dari JO kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN, namun Faktur Pajak tetap harus dibuat oleh JO dengan diberi cap “PPN dan PPnBM tidak dipungut”.
  - c. Atas penyerahan BKP/JKP dari anggota JO kepada JO, terutang PPN dan anggota JO harus membuat Faktur Pajak kepada JO. Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.
  - d. Atas perolehan BKP/JKP oleh anggota JO tetap terutang PPN yang dapat merupakan Pajak Masukan bagi anggota JO tersebut.
4. Dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek atas dasar “*turn key*” Namun barang-barang yang tercantum dalam daftar barang yang akan diimpor (*master list*) itu diimpor oleh dan atas nama pemilik proyek maka Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak dibuat atas dasar nilai kontrak dikurangi dengan nilai impor atas barang-barang yang pemberitahuan impor untuk Dipakai (PIUD-nya) atas nama pemilik proyek tersebut.

- 5 Dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dari hibah/dana pinjaman luar negeri dan sebagian lainnya dari APBN/APBD/dana lain selain hibah/dana pinjaman luar negeri, maka ketentuan sebagai berikut :
- a. Atas penyerahan/penerimaan Termin proyek yang dibiayai dari hibah/dana pinjaman luar negeri :
    - Tidak dipungut PPN dan PPnBM
    - Faktur Pajak tetap dibuat dengan cap “PPN dan PPnBM tidak dipungut”
    - Surat Setoran Pajak harus dibuat.
  - b. Atas penyerahan/penerimaan Termin proyek yang dibiayai dengan dana dari APBN/APBD/dana lain selain hibah/dana pinjaman dari luar negeri.
    - Terutang PPN
    - Faktur Pajak harus dibuat
    - Surat Setoran Pajak harus dibuat.
6. PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman dari luar negeri yang dituangkan dalam Daftar Isian Proyek atau dokumen yang dipersamakan dengan Daftar Isian Proyek, maupun yang diteruspinjamkan (*subsidiary loan agreement*) yang sudah terlanjur dipungut ataupun disetor sejak tanggal 1 April 1995, dapat diminta pengembalianya oleh pemilik proyek dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat kontraktor utama sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan dilampiri :
- a. Faktur pajak

- b. Surat Setoran pajak (SSP)
- c. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ), dan
- d. Surat pernyataan bahwa PPN tersebut belum dikreditkan sebagai Pajak Masukan atau dibebankan sebagai biaya.

## **11. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain, yaitu suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya.

Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan perkembangannya ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan memakai prinsip tarif tunggal.

## **12. Saat dan Tempat Terutang PPN**

### **a. Saat Terutang PPN**

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan dalam keadaan yang bagaimana kewajiban PPN tersebut muncul atau mulai terutang, Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU PPN 1984, tersebut terutang pada saat:

1. Penyerahan BKP/JKP
2. Impor BKP (masuk daerah pabean)
3. Pemanfaatan BKP dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **b. Tempat Terutang PPN**

Tempat terutang PPN dapat diartikan sebagai tempat dimana kewajiban PPN muncul atau mulai terutang pajak, adapun tempat terutang PPN tersebut dalam berbagai kondisi penyerahan adalah:

1. Untuk penyerahan BKP / JKP:
  - a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan
  - b. Tempat kegiatan usaha dilakukan jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan pengusaha kena pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai pajak terutang yang menentukan adalah tempat usaha sebagai pajak tentang yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan.

- c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk Impor, ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dihubungkan dengan tempat penyelesaian Bea Masuk.
3. Untuk pemfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

### **13. Faktur Pajak**

Menurut UU PPN No.18 tahun 2000 Pasal 1 ayat (23) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena Impor Barang Kena Pajak yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.

#### **1) Jenis Faktur Pajak**

Berdasarkan pasal 13 UU PPN tahun 2000 dan PP No. 143 tahun 2000 Faktur Pajak dapat berupa:

##### **1. Faktur Pajak Standar**

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang bentuk, unsur dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan untuk pembeli dan bukti Pajak Keluaran bagi penjual. Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, yang meliputi:

- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode Nomor Seri dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama, Jabatan dan Tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak (UU PPN, 2000:177).

Faktur Pajak Standar harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap tiga, meliputi:

- a. Lembar ke I : Untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
  - b. Lembar ke II : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang Menerbitkan Faktur Pajak standar sebagai bukti Pajak Keluaran.
  - c. Lembar Ke III : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan kepada Pemungut PPN.
2. Dokumen-dokumen tertentu ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar

Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU PPN No. 18 Tahun 2000 dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP. 522/PJ/2000 yang telah

diubah menjadi nomor KEP. 312/PJ/2001 ditetapkan bahwa dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat setoran Pajak dan/atau bukti pungutan Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Impor Barang Kena Pajak.
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilampiri dengan Invoice yang merupakan satu kesatuan yang terpisah dari PEB tersebut.

Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama, Alamat. Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Macam, Jenis, Kuantum.
- c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang termasuk Pajak atau besarnya Pajak dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal Pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

## **2) Saat Pembuatan Faktur Pajak**

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilaksanakannya Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, kecuali



Pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikut. Maka Faktur Pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.

- b. Pada saat Penerimaan Pembayaran per termin dalam hal Penyerahan sebagai tahapan pekerjaan.
- c. Pada saat Pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut.

### **3) Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Standar**

#### **1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.**

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### **2. Pengusaha Kena Pajak.**

Diisi dengan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar, sesuai dengan keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali alamat diisi dengan alamat tempat domisili/ tempat kegiatan usaha terakhir Pengusaha Kena Pajak.

#### **3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak.**

Diisi sesuai dengan nama, alamat dan Nomor Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak. Dalam hal Pembeli Barang Kena Pajak atau/dan Penerima Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak, maka Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diisi.

4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak :

a. Nomor Urut.

Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak yang diserahkan.

b. Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak.

Diisi dengan nama Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

- Dalam hal tarima Uang Muka atau Termin atau cicilan, kolom Nama Barang Kena Pajak diisi dengan keterangan, misalnya Uang Muka, atau Termin atau Angsuran, atas pembelian BKP dan/atau JKP.
- Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan keterangan jumlah unit dan harga per unit dari BKP yang diserahkan.

c. Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin.

Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.

5. Jumlah Harga Jual/penggantian/Uang Muka/Termin.

Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/termin.

6. Potongan Harga.

Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

7. Uang Muka yang telah diterima.

Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari barang Kena pajak dan/atau jasa Kena pajak.

8. Dasar pengenaan pajak.

Diisi dengan jumlah harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan uang Muka yang telah diterima.

9.  $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ .

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan pajak.

10. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

11. ....Tanggal.....

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

12. Nama, Jabatan dan Tandatangan.

Diisi dengan nama, jabatan dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani faktur pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN dilakukan, sebelum pejabat yang ditunjuk tersebut menandatangani faktur Pajak.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Peribadi tidak memiliki struktur organisasi, maka keterangan jabatan diisi dengan “Pemilik kegiatan Usaha” atau “Kuasa Pemilik Kegiatan Usaha” yang ditunjuk oleh Pemilik Kegiatan Usaha yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan pajak tempat Pengusaha Kena pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan PPN dilakukan, sebelum kuasa menandatangani faktur Pajak.

Pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani faktur tidak harus sama dengan pejabat atau kuasa yang berwenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN.

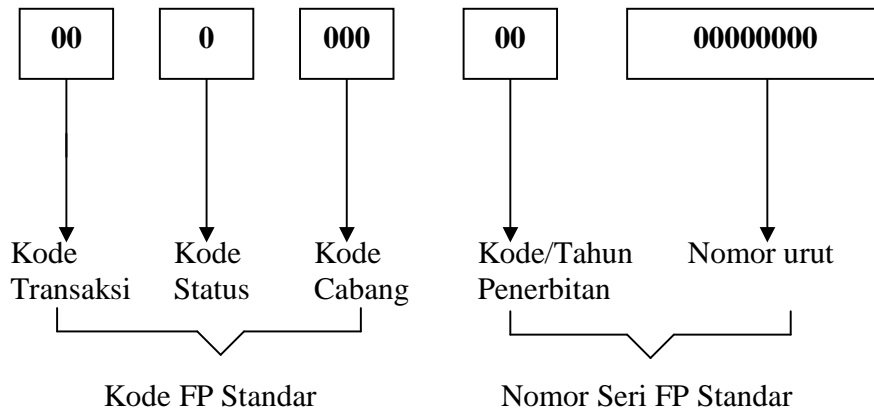
#### **4) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar**

##### **A. Format Kode dan Nomor Seri Pajak Standar**

1. Format Kode Faktur Pajak terdiri dari 6 (enam) digit , yaitu :
  - a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi,
  - b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status,
  - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode cabang
2. Format Nomor Seri Pajak Standar terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut;

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan,
- b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak Standar, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar berikut artinya:

010.000-07.00000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal (bukan Faktur Pajak Standar Pengganti), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor 1.

011.000-07.00000005, berarti penyerahan kepada selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Pengganti. Faktur Pajak Standar Pengganti diterbitkan tahun 2007 dengan Fakur nomor urut 5. Dalam hal ini Kode dan Nomor Seri Pajak Standar yang ganti harus dicantumkan dalam

kolom yang telah disediakan (yaitu kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.

**Faktur Pajak Standar yang Cacat, Rusak, Salah dalam Pengisian atau Salah dalam Penulisan (PER - 159/PJ./2006)**

- Hal-hal yang menyebabkan faktur pajak menjadi cacat antara lain :
  - a. Pengisian Faktur Pajak tidak mengikuti ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 18 Tahun 2000
  - b. Pembetulan Faktur Pajak dengan cara menghapus, mencoret atau cara lain
  - c. Faktur Pajak yang robek, basah atau lecek yang menimbulkan ketidakjelasan informasi
  - d. Hasil print atau ketikan yang tidak jelas.
- Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti.
- Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan menghapus, mencoret atau dengan cara lain, selain dengan cara yang telah ditetapkan undang-undang perpajakan.
- Penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan.

- Faktur Pajak Standar Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian dengan dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
- Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan timbulnya Pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.
- Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian, dan Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut dapat membuat *copy* dari arsip Faktur Pajak Standar.

#### **14. Pengkreditan Pajak masukan**

Prinsip-prinsip Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 UU PPN

2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
3. Kriteria Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak (Pembeli).

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak (Penjual).

### **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan**

1. Memenuhi persyaratan formal
  - Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan.
  - Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN Tahun 2000 jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah NO. 143 Tahun 2000
2. Memenuhi persyaratan materil



- Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Belum dibebankan sebagai biaya.

### **Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan**

Dalam Pasal 9 ayat (8) UU No. 18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran:

1. Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan motor sedan, jeep, *staton wagon*, van, dan zombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
8. Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Disamping itu sesuai dengan Pasal 16B Ayat 3 UU KUP PPN dan PPnBM menegaskan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

## **15. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

### **1. Fungsi SPT**

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **2. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT**

Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

### **3. Pembentukan SPT**

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT tersebut, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri.

Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau
- c. Jumlah harga menjadi lebih besar
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar

Sanksi 2 kali (200 %) Pembetulan setelah pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak karena kealpaan

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tersebut dengan sertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah

pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar

#### **4. Batas waktu penyampaian SPT**

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang menyampaikan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 20 bulan takwin setelah masa pajak berakhir.

#### **5. Sanksi terlambat menyampaikan SPT**

Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dapat dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000.

### **16. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Merupakan akuntansi yang kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan PPN. Akuntansi PPN ini berguna bagi perusahaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan PPN dan PPnBM.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Wajib Pajak tidak perlu membuat dua pembukuan (ganda) yang dipergunakan untuk perpajakan (fiskal) dan untuk tujuan lain (komersial).

Pada prinsipnya, PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu prinsip akrual dan kas. Dalam prinsip akrual, PPN yang terutang pada saat pembayaran barang, jasa

atau impor barang, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Sedangkan dalam prinsip kas, PPN terutang pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa.

Atas dasar hal tersebut, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang dan jasa dilakukan. Terdapat dua cara pembukuan PPN dalam akuntansi, yaitu metode faktur dan metode kas. Dalam metode faktur, PPN yang terutang dicatat pada saat faktur dikeluarkan. Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran atau pada saat penerimaan pembayaran. Pencatatan tidak tergantung pada saat pembuatan faktur.

Undang-undang hanya mensyaratkan PKP untuk untuk menyelenggarakan pembukuan. Pada pasal 28 ayat (4) UU No. 9 tahun 1994, syarat minimal yang harus dipenuhi bagi wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuannya yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung pajak terutang.

Pelaksanaan pembukuan harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin dan mata uang rupiah. Saldo perkiraan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada akhir periode akuntansi dikurangkan. Bila saldo perkiraan Pajak Masukan lebih besar dari saldo perkiraan pajak keluaran, maka jumlah sisanya disajikan di sisi debet bagian aktiva lancar. Sebaliknya bila saldo pajak masukan lebih kecil dari pada saldo perkiraan pajak keluaran, maka sisanya dicantumkan di sisi kredit bagian passiva lancar.

Tujuan lain dari akuntansi PPN adalah:

- a. Memenuhi ketentuann minimum administrasi perpajakan PPN.
- b. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.

- c. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara.
- d. Dasar untuk meminta restitusi.
- e. Alat pertahanan wajib pajak dalam menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

### Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Masukan

Akuntansi ini terkait pada catatan mengenai pembelian atau impor yang berisi:

1. Nomor urut transaksi.
2. Tanggal Faktur Pajak / PIUD.
3. Nomor Faktur Pajak.
4. NPWP penjual/ Pemberi jasa / kantor Bea dan Cukai.
5. Nama Barang dan Jasa.
6. Kuantitas.
7. Dasar Pengenaan Pajak.
8. Besar PPN yang dapat dan tidak dapat dikreditkan.
9. Retur pembelian / penyerahan kembali barang titipan.

Prosedur pencatatan pembelian yang PPNnya dapat dikreditkan maupun tidak dapat dikreditkan.

1. Pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPNnya.

- a. Pembelian dengan system fisik.

Perkiraan	Debet	Kredit
Pembelian	Rp. xxx	
Pajak Masukan	Rp. xxx	
Hutang		Rp. xxx

- b. Pembelian dengan system perpetual.

Perkiraan	Debet	Kredit
Persediaan	Rp. xxx	
PPN Masukan	Rp. xxx	

Hutang		Rp.xxx
--------	--	--------

2. Pembelian yang PPNnya tidak dapat dikreditkan.

Hal ini tergantung pada jenis barang dan masa manfaatnya.

Contoh:

Pembelian perlengkapan kantor seharga Rp. 9.500.000 + PPN 10% (Rp. 950.000) secara kredit. Karena masa manfaat > dari satu tahun, maka PPN tersebut merupakan biaya yang bersangkutan.

Jurnalnya:

Perkiraan	Debet	Kredit
Perlengkapan Kantor Hutang	Rp. 104.500.000,-	Rp. 104.500.000,-

3. Pembelian yang terdapat potongan harga.

Misal: Membeli barang seharga Rp. 16.000.000, potongan pembelian Rp.400.000

PPN 10% = Rp.1.470.000

Jurnalnya:

Perkiraan	Debet	Kredit
Pembelian Potongan Pembelian PPN Masukan Utang	Rp. 16.000.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.470.000,-	Rp. 17.870.000,-

4. Jika terjadinya pembelian

Dari segi pembeli, PPN masukan akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan. Sedangkan bagi penjual akan mengurangi Pajak Keluaran yang merupakan PPN yang terutang.

Jurnalnya:

Perkiraan	Debet	Kredit
Hutang Pembelian PPN Masukan	Rp. xxx	Rp. xxx Rp. xxx

Prosedur pencatatan penjualan dengan PPN terutang

a. Untuk transaksi biasa

Perkiraan	Debet	Kredit
Piutang Penjualan PPN Keluaran	Rp. xxx	Rp. xxx Rp. xxx

b. Return penjualan

Untuk sistem fisik

Perkiraan	Debet	Kredit
Pembelian PPN Keluaran Piutang	Rp. xxx	Rp. xxx Rp. xxx

Untuk system perpetual

Perkiraan	Debet	Kredit
Penjualan PPN Keluaran Piutang	Rp. xxx Rp. xxx	Rp. xxx

Perkiraan	Debet	Kredit
Persediaan HPP	Rp. xxx	Rp. Xxx

c. Penjualan dengan uang muka

Perkiraan	Debet	Kredit
-----------	-------	--------



Kas	Rp. xxx	
Uang muka langganan		Rp. xxx
PPN Keluaran		Rp. Xxx

5. Saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan pada setiap akhir bulan setiap pengusaha kena pajak akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara pajak keluaran. Selanjutnya mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa dan membuat laporan.

Jurnalnya:

Perkiraan	Debet	Kredit
PPN Keluaran	Rp. xxx	
PPN Masukan		Rp. xxx
PPN yang masih harus dibayar		Rp. xsxx

Perkiraan	Debet	Kredit
PPN yang masih harus dibayar	Rp. xxx	
Kas/ Bank		Rp. xxx

Sedangkan untuk jurnal penutup adalah:

Perkiraan	Debet	Kredit
PPN Keluaran	Rp. xxx	
PPN Lebih Bayar	Rp. xxx	
PPN Masukan		Rp. xxx

Jurnal ini dibuat jika PPN masukan > dari PPN keluaran

## 17. Pajak Dalam Islam

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dalam islam juga dikenal istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW Bersabda: “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat”.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya

*...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dari taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.

Zakat adalah salah satu rukun islam, karena itu status hukumnya wajib, sama dengan rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Quran dan Hadist berikut ini:

*Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka (QS Al-Taubah: 103).*

*...dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya...(QS Al-An'am:*

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Cahaya Araminta adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang eceran bahan bangunan untuk pasar Sumatera dan Kontruksi. PT. Cahaya Araminta didirikan Tahun 1991 sebagai perusahaan swasta dan keluarga, awalnya bergabung sebagai distributor dan eceran untuk produk Granito tile dari PT. Ganitoguna Building Ceramics untuk pasar kontruksi di Provinsi Riau.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini menyatakan bahwa PT. Cahaya Araminta, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01. 554. 783.9- 221. 000 yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 20 Kampung Dalam Kotamadya Pekanbaru, telah terdaftar sejak tanggal 25 Juli 2003.

Pertumbuhan Kontruksi dan teknologi yang cepat telah banyak membawa perubahan pada perusahaan, tidak hanya tertuju pada eceran saja. Tahun 2000 perusahaan mampu menunjukkan diri dalam layanan konstruksi dan bergabung sebagai fabrikator dan distributor untuk produk PT. Bluescope Lysaght di pulau Sumatera, dengan lini produk kunci terdiri dari Ligt Weight Steel.

Selama 15 tahun telah ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah-rumah dan gedung-gedung di pulau Sumatera. Tahun 2004 PT. Cahaya Araminta menjadikan perusahaannya sebagai distributor produk PT.Cipta Mortar Utama dimana produk utamanya adalah semen instant yang diproduksi dengan teknologi M-Tec. Dengan

kepercayaan penuh dari PT. Onduline Indonesia, tahun 2006. Saat ini Onduline telah dikembangkan untuk Daerah Riau.

Perusahaan juga mendukung pelanggannya untuk mulai menghitung biaya material dengan menggunakan perangkat lunak, instalasi, dan layanan teknik. Untuk memastikan prosedur dan penanganan produk yang benar maka disediakan dan berlaku kontrak dengan jaminan penyelesaian pekerjaan.

PT. Cahaya Araminta telah membangun pabrik, gedung, rumah pribadi, penelitian untuk solusi inovatif dan menyediakan bahan bangunan guna memenuhi kebutuhan pelanggan di pulau Sumatera. Masing-masing tugas dikendalikan dengan memeriksa prosedur pokok untuk operasi untuk diterapkan terus menerus.

## **B. Struktur Organisasi**

Dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang dimana kegiatan usaha yang harus dilakukan semakin luas dan kompleks. Maka untuk mendukung kelancaran dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditentukan maka diperlukan adanya koordinasi, kesatuan dalam bertindak dan berbuat serta pengendalian yang telah terjamin, sesuai struktur organisasi. Dalam struktur organisasi PT. Cahaya Araminta diperlihatkan bahwa setiap tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan bagian-bagian peserta tugas yang ada dalam perusahaan ini:

### **1. Direktur Utama**

Merupakan puncak pimpin yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan aktivitas perusahaan.

Tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengawasan terhadap jalannya organisasi Perusahaan.
- b. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan secara umum yang menyangkut tentang pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan.
- c. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada dalam perusahaan.
- d. Membuat rencana-rencana perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- e. Memberikan persetujuan kepada manager dalam hal memberi menjual dan memindahkan hak milik atas harta kepada pihak lain.

## **2. Wakil Direktur ( Kuasa Direktur)**

Merupakan bawahan Direktur Utama yang memiliki tugas dan tanggungjawab menggantikan tugas-tugas. Direktur Utama apabila Direktur Utama tidak sedang ditempat atau sedang berhalangan atau dengan kata lain mewakili Direktur Utama apabila tidak berada ditempat.

## **3. Bagian Administrasi dan Personalia**

Tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- a. Membuat surat-surat dalam hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dipersonalia, baik intern maupun ekstern.
- b. Merekrut pegawai atau karyawan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.

- c. Mengatur penerimaan pegawai atau karyawan yang berdasarkan pada keperluan baik dalam arti jumlah maupun dalam arti mutu.
- d. Mengurus pemberian gaji kepada pegawai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perusahaan tersebut.
- e. Memberi bimbingan, latihan dan arahan kepada karyawan didalam pelaksanaan pekerjaannya.

#### **4. Bagian Keuangan**

Tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- a. Mencatat semua transaksi-transaksi keuangan dalam buku jurnal, buku besar dan buku tambahan.
- b. Menata, menyimpan, menjaga dan memelihara semua dokumen yang berhubungan dengan akuntansi.
- c. Membuat laporan keuangan secara periodik yang meliputi:
  - 1. Neraca
  - 2. Laporan Laba Rugi
  - 3. Laporan perubahan posisi keuangan
  - 4. Laporan-laporan lain yang dianggap perlu
- d. Pelaksanaan pembayaran setiap pengeluaran dan kewajiban membayar kepentingan-kepentingan usaha yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan.
- e. Mengatur semua pemasukan uang dan pengeluaran biaya-biaya operasional perusahaan.
- f. Melakukan tugas-tugas khusus lainnya dibidang keuangan.

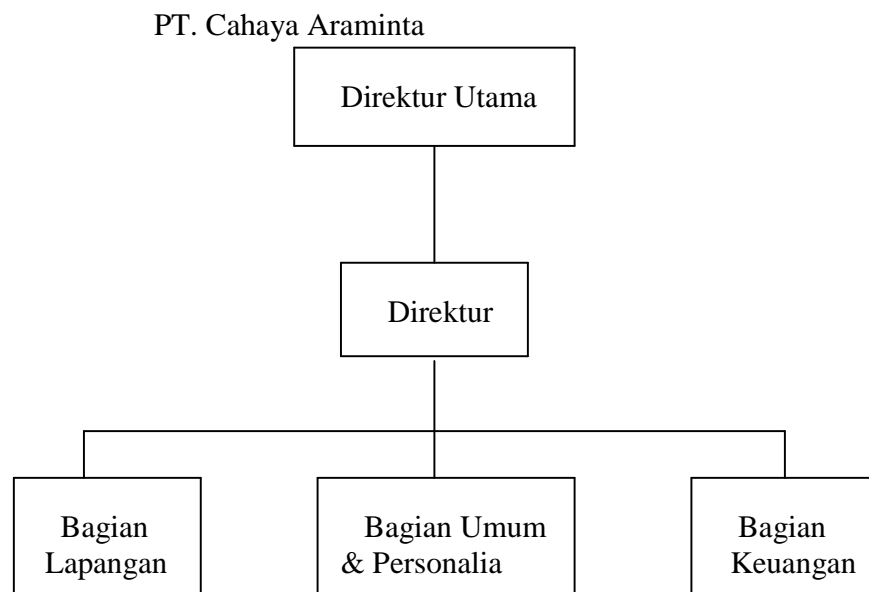
- g. Melakukan perhitungan beasrnya pajak berdasarkan laporan keuangan.
- h. Melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor, dan melaporkan).

## 5. Bagian Lapangan

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjalankan alat berat yang disewakan kepada perusahaan lain
- b. Mengawasi alat berat dilapangan bila ada yang rusak.
- c. Dan lain-lain.

Gambar II. 1: Struktur Organisasi



*Sumber: PT. Cahaya Araminta*

## C. Aktivitas Perusahaan

Aktivitas perusahaan merupakan kegiatan yang terjadi didalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung kaan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan aktivitas perusahaan yang lancar diharapkan dapat



mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang optimal. Disamping mendukung misi pemerintah, PT. Cahaya Araminta sebagai salah satu perusahaan yang diserahkan untuk ketentuan laba.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang telah dikemukakan pada pendahuluan, sehubungan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta penerapannya pada perusahaan tersebut.

#### **A. Subjek Pajak**

PT. Cahaya Araminta merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan. Terdaftar di KPP Pekanbaru sejak Tanggal 25 Juli 2003. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cahaya Araminta adalah 01. 554.783.9- 211. 000

Kewajiban perpajakan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29.

#### **B. Pengkreditan Pajak Masukan**

Dari laporan SPT selama Tahun 2007 PT. Cahaya Araminta melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebesar Rp.25.371.888.308,- dari jumlah penyerahan tersebut terdapat penyerahan yang tidak dipungut PPN sebesar Rp. 2.846.870.253,- penyerahan tersebut tidak dipungut PPN karena proyek pemerintah yang di biyai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

Pajak Masukan terhadap penyerahan yang tidak dipungut dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan, sedangkan PT. Cahaya Araminta ini mengkreditkan Pajak Masukan atas penyerahan PPN. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa,

PT. Cahaya Araminta harus melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan yang terlanjur dikreditkan pada Tahun 2007. Dari data penulis kumpulkan besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 128.994.619,- untuk lebih jelasnya berikut ini penulis sajikan daftar Pajak Masukan selama Tahun 2007 sbb:

**Tabel IV. Daftar Pajak Masukan**

No.	SPT Masa bulan	Pajak Masukan Versi Perusahaan	Pajak Masukan Versi Penulis	Selisih
1	Januari	136,300,326	96,639,558	39,660,768
2	Februari	105,897,804	78,799,560	27,098,244
3	Maret	99,753,406	96,110,945	3,642,461
4	April	137,223,334	134,002,750	3,220,584
5	Mei	277,269,564	275,830,863	1,438,701
6	Juni	172,810,875	166,433,289	6,377,586
7	Juli	140,872,064	140,872,064	-
8	Agustus	133,476,747	121,700,744	11,776,003
9	September	104,110,377	104,110,377	-
10	Oktober	130,106,249	130,106,249	-
11	November	259,372,999	259,372,999	-
12	Desember	134,994,696	99,214,424	35,780,272
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,832,188,441</b>	<b>1,703,193,822</b>	<b>128,994,619</b>

Sumber: PT. Cahaya Araminta

Sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 13 Ayat (2) dan (3) UU KUP menyebutkan bahwa kantor pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya di Kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tariff nol persen, akan dikenakan sanksi sebesar 100% dari PPN yang kurang atau kurang bayar.

Adapun besarnya sanksi yang dapat dikenakan terhadap PT. Cahaya Araminta adalah sebesar Rp. 128.994.619,- ditambah dengan sanksi denda sebesar  $100\% \times \text{Rp. } 128.994.619 = \text{Rp. } 128.994.619,-$

### C. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Partambahan nilai yang terutang Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah PT. Cahaya Araminta telah memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 undang-undang PPN dan pasal 28 UU KUP. Dari Tabel IV. I dapat dilihat bahwa PT. Cahaya Araminta telah melakukan pembelian sebesar Rp.18.321.884.410,- dengan pajak masukan sebesar Rp 1.832.188.441,-.

**Tabel IV.II Daftar Pajak Keluaran dan Masukan**

No.	SPT Masa bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Selisih	Jumlah LB/KB
1	Januari	172,598,109	136,300,326	78,059,113	(41,761,330)
2	Februari	132,835,875	105,897,804	42,761,113	(14,823,042)
3	Maret	139,585,225	99,753,945	14,823,259	25,008,560
4	April	196,804,413	137,223,334		59,581,079
5	Mei	279,464,306	277,269,564		2,194,742
6	Juni	174,351,413	172,810,875		1,540,538
7	Juli	147,778,419	140,872,064		6,906,355
8	Agustus	198,392,453	133,476,747		64,915,706
9	September	134,898,895	104,110,377		30,788,518
10	Oktober	193,447,260	130,106,249		63,341,011
11	November	272,480,944	259,372,999		13,107,945
12	Desember	209,863,683	134,994,696		74,868,987
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,252,500,995</b>	<b>1,832,188,441</b>	<b>134,643,485</b>	<b>285,669,069</b>

*Sumber: PT. Cahaya Araminta*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pajak lebih bayar Tahun 2006 sebesar Rp. 78.059.113,- sedangkan jumlah Pajak Keluaran selama Tahun 2007 Rp. 2.252.500.995,- dan Pajak Masukan sebesar Rp.1.832.188.441,-

Dari data diatas PT. Cahaya Araminta telah melakukan pencatatan terhadap pembelian BKP/JKP dengan jurnal sbb:

Perkiraan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian Barang Dagangan	18,321,884,410	
Pajak Masukan	1,832,188,441	
Hutang usaha		20,154,072,851

Sedangkan jurnal untuk penyerahan BKP adalah:

Perkiraan	Debet( Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Piutang Usaha	27,624,389,303	
Penjualan		11,430,186,921
Pendapatan Proyek		13,941,701,387
PPN Keluaran		2,252,500,995

Jurnal untuk pelaporan adalah:

Perkiraan	Debet( Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	2,177,632,008	
PPN Lebih Bayar		78,059,113
Pajak Masukan		1,832,188,441
Kas		267,384,454

Dari penyetoran PT. Cahaya Araminta telah melakukan pembukuan ssb:

**Pajak Pertambahan Nilai  
Lebih Bayar / Kurang Bayar**

Saldo 1/1 2007	Rp. 78.059.113	PPN Keluaran	Rp.2.252.500.995
Pajak Masukan	Rp.1.832.188.441	Pajak Lebih Bayar	Rp. 78.059.133
PPN Keluaran	<u>Rp.2.177.632.008</u>	Pajak Masukan	<u>Rp.1.832.188.441</u>
	<b>Rp.4.087.879.582</b>		<u>Rp.4.162.748.569</u>
		Saldo PPN Kurang	
		Bayar	<u>Rp. 74.868.978</u>
			<b>Rp. 4.087.879.582</b>

**D. Koreksi Atas Faktur Pajak Standar yang Cacat atau Tidak Lengkap**

Dari data yang diperoleh penulis pada bulan Desember penulis menemukan Faktur Pajak Standar atas pembelian kepada PT. Onduline Indonesia. Pada Faktur Pajak Standar tersebut tidak terdapat cap dan tandatangan Direktur PT. Onduline Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

Sebagaimana penegasan dalam Pasal 13 ayat (5) bahwa Faktur Pajak harus diisi lengkap, benar dan jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f. Karena kesalahan tersebut PT. Cahaya Araminta tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Adanya kekurangan satu huruf atau kesalahan ejaan dalam suatu kata dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat, dan dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) Undang-undang KUP.

PT. Cahaya Araminta bisa mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dengan meminta pembetulan Faktur Pajak Standar pada PT. Onduline Indonesia. Sehingga PT. Cahaya Araminta tidak akan dikenakan sanksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut.

#### **E. Pembetulan SPT Masa PPN**

Dari laporan SPT Masa PPN penulis menemukan kesalahan dalam SPT Masa PPN bulan Agustus Tahun 2007, yaitu salah dalam memasukan Kode Faktur Pajak Standar, pada Pajak Masukan atas nama PT. Granitoguna Buildding Ceramics dengan Kode Faktur Pajak Standar 010-001.07.00002855 (ini menunjukkan kode cabang) sedangkan di Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan oleh PT. Granitoguna Buildding Ceramics Nomor Faktur Pajak Standarnya adalah 010-000.07.00002855 (ini

menunjukkan kode pusat). Sehingga PT. Cahaya Araminta harus membetulkan SPT Masa PPN bulan Agustus karena tidak sesuai dengan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT. Granitoguna Building Ceramics yang dapat menyebabkan terjadi pemeriksaan oleh Kantor Pajak.

Menurut penulis apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat :

1. Direktur jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat hutang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan pembayaran karena pembetulan SPT.
2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan dengan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Dari kesalahan pelaporan SPT Masa PPN PT. Cahaya Araminta dapat melakukan pembetulan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh direktorat Jenderal Pajak. Akibat dari kesalahan tersebut PT. Cahaya Araminta harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan Agustus, yang kesalahan tersebut tidak akan mengganggu hutang pajak PPN karena hanya kesalahan penginputan kode Faktur Pajak.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada PT. Cahaya Araminta terkait permasalahan dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. PT. Cahaya Araminta merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan kontraktor dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. PT.Cahaya Araminta adalah Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP sehingga berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungutnya.
3. PT. Cahaya Araminta dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Dalam hal pengkreditan Pajak Masukan, PT. Cahaya Araminta melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
5. Terdapat dalam laporan SPT Masa PPN Tahun 2007 ternyata PT. Cahaya Araminta ini terdapat adanya Faktur Pajak cacat yang disebabkan oleh tidak terdapatnya cap dan tanda tangan.

6. Dalam laporan SPT Masa PPN Tahun 2007 terdapat adanya kesalahan dalam pengisian nomor seri Faktur Pajak.

## **B. Saran**

1. PT. Cahaya Araminta sebaiknya memperhatikan jangka waktu pembyaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran PPN perusahaan.
2. Pihak Perusahaan hendaknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan khususnya yang berkenaan dengan PPN, mengingat peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan-perubahan mengikuti kondisi kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia.
3. Sebaiknya perusahaan mengikuti seminar-seminar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak setempat atau instansi terkait agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menghitung pajak sehingga dikenakan sanksi-sanksi yang dapat menjadi beban perusahaan dan dapat menjadi beban dan dapat menambah informasi bila ada perubahan.
4. Perusahaan telah melaksanakan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 18 tahun 2000. Perusahaan sebagai wajib pajak sebaiknya mentaati peraturan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari. *Pengantar Perpajakan & Hukum Pajak*. Cetakan Pertama. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Pekanbaru, 2007.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Ed. Revisi Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Ed. Ketiga. PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2003..
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Ed. Ketujuh. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Diana, Anastasia. & Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, 2004.
- Djuanda, Gustian. & Irwansyah. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Penjualan Barang Mewah*. Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hernanto. *Akuntansi Perpajakan*. Cet. Pertama. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Waluyo & Wirawan B Ilyas. *Perpajakaaan Di Indonesia*. Ed. Revisi. Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Mardiasmo. *Pepajakan*. Ed. Revisi. Penerbit Andi Ofset, Yogyakarta, 2003.
- Nasution, Lukman Hakim & Marsyahrul, Tony. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta, 2008.
- Judisseno, Rimsky Grasindo K. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Yusdianto. Prabowo. *Perpajakan Terapan*. Gramedia Pustaka Utama, Juakarta, 2002.
- Undang-undang RI No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*
- Yani, Ahmad. *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta, Kencana, 2006.

Tjahjono, Achmad & Triyono Wahyudi. *Perpajakan Indonesia*. Ed. Revisi. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2005.

Rusdji, Muhammad. *Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah*. Ed. Ketiga. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta, 2006.

Rusdji, Muhammad. *KUP Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan*. Ed. Keempat. Jakarta, 2007.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Ed. Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta, 2007.

Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia suatu pengantar*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.

Niswonger. *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Ed. 19. Erlangga, Jakarta, 1999.

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV. 1 Daftar Perhitungan Pajak Masukan.....	75
Tabel IV. II Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

Gambar II. 1 Struktur Organisasi PT. Cahaya Araminta.....	72
---	----